

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

# DPRD DKI Pertanyakan Anggaran MCU KPSS

## ► Tekan Risiko Kematian Massal di Pemilu 2019 Terulang

### Gambir, Warta Kota

Komisi A DPRD DKI Jakarta mempertanyakan pagu anggaran untuk pemeriksaan kesehatan atau medical chek up (MCU) bagi calon Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) jelang Pemilu 2024 mendatang. MCU dilakukan untuk menekan risiko kematian para KPSS akibat kelelahan, sekaligus menghindari kejadian kelam Pemilu 2019 lalu.

"Empat poin (permintaan pemeriksaan MCU) yang disampaikan KPU memang nggak masalah? (terhadap anggaran)," ujar Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono saat rapat kerja dengan eksekutif pada Senin (4/12/2023).

Hal itu dikatakan Mujiyono saat menyanggah paparan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati. Dalam rapat itu, Ani meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan surat permohonan agar pemerintah mengeluarkan Instruksi Sekretaris Daerah (Insekda) Provinsi DKI Jakarta untuk memfasilitasi MCU.

"Pada dasarnya tidak masalah untuk MCU, begitu ada surat kami akan susun Insekda," kata Ani.

"Pagu anggarannya sudah ada di Dinas Kesehatan atau pakai Insekda?" timpal Mujiyono.

Ani menjelaskan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta sebetulnya tak memiliki anggaran untuk MCU. Namun dinas bisa memanfaatkan anggaran berlebih yang ada di Puskesmas maupun rumah

sakit umum daerah (RSUD).

"Kalau dari Dinas Kesehatan (anggaran) sendiri tidak ada Pak, tapi Puskesmas dan rumah sakit itu memiliki anggaran lebih. Jadi kalau yang terkait MCU, operasional ambulans, operasional faskes, layanan kesehatan itu saya rasa sudah bisa dilaksanakan dengan anggaran yang ada," jelas Ani.

### Kemampuan Anggaran

Ragu dengan jawaban Ani, Mujiyono kembali bertanya soal kemampuan anggaran yang dimiliki Puskesmas dan RSUD. Mujiyono bilang, jumlah yang ditanggung untuk MCU tidak sedikit karena total kebutuhan KPPS mencapai 210.000 orang.

"Kapasitasnya kan banyak bu, cover (menutup) pelayanan itu dari yang normal, ditambah 210.000 nggak mungkin perlakuannya normal pasti harus ada penambahan," ungkap Mujiyono.

Ani mengatakan, akan menghitung kebutuhan anggaran yang ada untuk menyesuaikan dana yang dimiliki rumah sakit maupun Puskesmas. Jika mereka membutuhkan anggaran, pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran tambahan.

"Kalau memang nanti kemampuan keuangan teman-teman BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) membutuhkan support (dukungan), kami akan mengajukan dan memang pintu masuknya itu lewat Insekda, sehingga kami bisa mengajukan kebutuhan anggaran," kata Ani. (faf)